

## TAJUK RENCANA

### Perlu Peta Guru Menyiapkan Indonesia Emas

**BERAPA** jumlah guru yang siap dan adaptif untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas? Mungkin pertanyaan itu perlu dilontarkan. Dengan pelbagai tantangan dan tuntutan yang serba digital, sanggupkah dunia pendidikan terutama para guru adaptif mengikuti perubahan dan perkembangan zaman saat ini?

Pertanyaan yang wajar. Mau tidak mau, transformasi teknologi dalam pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Penguatan kompetensi guru untuk melahirkan perubahan besar, adalah tuntutan zaman.

Tragisnya, problema dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan yang kompleks dan pelik. Tidak sekadar peningkatan kompetensi guru, namun banyaknya guru honorer yang dibayar di bawah UMK dan belum berstatus jelas, kurangnya pemerataan penempatan guru, kekurangan guru terutama di daerah terpencil dan lainnya. Padahal Mendikbudristek Nadiem Makarim berkali-kali menyebutkan, Indonesia kekurangan sekitar 1 juta guru periode 2020-2024 dan angkanya diperkirakan akan bertambah terus. Karena pembukaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, guru pensiun namun tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS guru.

Problema yang mengingatkan pada 'kalimat legendaris' Kaisar Hirohito saat pertamakali mendengar negaranya luhur lantak akibat bom nuklir AS: *Berapa jumlah guru yang tersisa?* Pertanyaan yang membuat para jenderal heran, mengapa Kaisar justru mempertanyakan jumlah guru. Padahal para jenderal yakin mampu menyelamatkan dan melindungi Kaisar tanpa bantuan guru.

"Jepang jatuh, kalah dalam Perang Dunia II karena mereka tidak belajar". Penjelasan Kaisar cukup membebalakkan mata jenderal. Meski kuat persenjataan dan strategi perang namun menurut Kaisar mereka tidak mengetahui cara membuat bom seperti yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Maka Kaisar berpendapat kalau mereka semua tidak belajar, bagaimana mungkin mereka akan mengejar ketertinggalan mereka dan bangkit lagi dari

keadaan ini? Kepada siapa mereka harus belajar, tentu para guru.

Kalimat bijak yang mesti menyadarkan kita, betapa kita harus mengakui saat ini pun sudah tertinggal. Diakui atau tidak, pandemi covid yang membuat kegiatan belajar di rumah (BdR), pembelajaran dalam jaringan (daring) telah menimbulkan penurunan kualitas kognisi, ketrampilan vokasi dan ketrampilan sosial siswa. Bukan sekadar kekhawatiran, namun *learning loss*, jelas terlihat. Terlebih, konsep pembelajaran jarak jauh yang ditawarkan pemerintah dalam masa pandemik terkesan terga-gagap. Sementara, koneksi internet juga terhambat.

Maka upaya pemerintah lewat Kemendikbudristek mencetak 40.000 guru untuk menggantikan mereka yang pensiun setiap tahun, patut dilihat. Apalagi tekadnya, mencetak guru berkualitas dan sertifikat pendidikan menjadi kunci menjadi guru kompeten. (KR, 26/11) Namun apakah Program Pendidikan Profesi Guru (PPPG) Prajabatan untuk mencetak guru berkualitas dan kompeten akan bisa menyusul dan menyiapkan generasi Indonesia Emas? Kita tunggu! Mengingat guru tidak sekadar transfer ilmu. Namun seperti diemukakan praktisi pendidikan St Kartono, harus memurnikan motivasi dan menempatkan mendidik sebagai 'pekerjaan hati'.

Kemendikbudristek Juni lalu telah mengumumkan, kebutuhan Guru ASN 2022 mencapai 970.410. Namun formasi yang diajukan, baru 35% kebutuhan. Selama ini kekurangan tersebut diatasi dengan keberadaan guru honorer. Di sisi lain, upaya pemenuhan melalui formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dilakukan Kemendikbudristek pun belum maksimal.

Penyelesaian problema guru dalam dunia pendidikan, jelas: perlu koordinasi dan sinergi dalam menyelesaikan masalah ini. Penambahan formasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah. Keberadaan peta kebutuhan yang jelas tentu tidak lepas dari laporan setiap sekolah mengenai kompetensi yang diperlukan. □f

**BEBERAPA** sekolah yang ditunjuk pemerintah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak Kemendikbudristek meluncurkan, 11 Februari 2022. Kurikulum ini diupayakan untuk mendukung *learning loss recovery* akibat pandemi Covid-19. Menteri Nadiem Makarim menyebut kurikulum ini lebih fleksibel dalam pelaksanaannya dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter siswa.

Salah satu yang menjadi ciri Kurikulum Merdeka adalah adanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yaitu pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran yang berbasis proyek (*project-based learning*). P5 mengajak siswa tidak hanya belajar di kelas namun juga belajar épengetahuan hidupi yaitu sebagai kejadian yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Karenanya, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan P5 berjalan dengan baik. Tujuan utama dilaksanakan P5 ini sebenarnya untuk memberikan penguatan karakter pada pelajar agar sesuai dengan karakter Pancasila dengan berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya.

#### Diminimalkan

Seiring dengan kemajuan zaman dan segala problemanya, degradasi nilai moral generasi muda tidak dapat dihindarkan, namun diyakini dapat diminimalkan. Dalam KBBI, degradasi berarti kemunduran atau kemerosotan. P5 diangkat untuk mengembalikan karakter siswa ke arah yang benar melalui pengalaman hidup dalam masyarakat. P5 dilaksanakan dengan melatih siswa untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan nantinya dengan berkolaborasi para siswa ini berusaha memecahkan masalah tersebut.

Terdapat beberapa tema P5 yang diberikan pada siswa sesuai tahapan belajar dan kebutuhannya, seperti gaya hidup berkelanjutan, suara demokrasi, rekayasa teknologi, kewirausahaan dan lainnya. Guru akan fokus pada penilaian proses yaitu bagaimana siswa terlibat menyele-

#### Lilis Ummi Fa'iezah

saikan permasalahan dalam masyarakat, bukan karya atau aksi yang dipamerkan. Dalam berproses tersebut diharapkan bertumbuh karakter baik dalam diri siswa sejak dini.

Para ahli pendidikan mengatakan bahwa karakter tidak dibentuk melalui pembiasaan saja namun juga diajarkan. P5 mengajak siswa belajar karakter secara langsung dengan menangani permasalahan dalam masyarakat. Menurut Lickona



KR-JOKO SANTOSO

(2012), bila ingin menjadikan generasi muda sebagai generasi yang unggul, maka para guru harus memasukkan pendidikan nilai, termasuk menanamkan sikap hidup bermasyarakat sebagai bagian dari materi pembelajaran. Lewat P5, pendidikan nilai yang meliputi pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral diharapkan dapat tersampaikan.

Pengetahuan moral yaitu membimbing siswa untuk mengetahui nilai-nilai yang baik ataupun buruk dalam masyarakat. Dalam P5, siswa akan berhadapan dengan berbagai peristiwa yang membuat mereka harus mengambil keputusan

terkait hal baik dan buruk. Tugas guru membimbing dan mengarahkan mereka agar mereka tahu ada masalah yang perlu diselesaikan. Akhirnya mereka percaya diri mengambil tindakan yang benar.

#### Perasaan Moral

Perasaan moral yaitu mengarahkan siswa untuk selalu menginginkan hal-hal yang benar. Menumbuhkan perasaan moral sangat diperlukan untuk menggugah rasa empati dari diri siswa terhadap permasalahan yang ada. Harapannya, siswa peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat dan tergugah untuk ikut berperan mengatasi masalah tersebut.

Tindakan moral yaitu memberi contoh dan menumbuhkan semangat siswa agar selalu melakukan dan mewujudkan hal-hal yang baik menjadi kenyataan. Sehingga permasalahan dalam lingkungan sosial masyarakat dapat terselesaikan. Tindakan moral merupakan hasil dari penanaman yang kuat dari pengetahuan moral dan perasaan moral.

Intinya, pengetahuan moral akan meningkatkan perasaan moral yang kuat yang akan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan moral. Setelah siswa melaksanakan pembelajaran P5, harapannya tumbuh karakter yang baik dari diri siswa yang di masa depan dapat digunakan sebagai bekal menjadi warga masyarakat yang baik. □f

*\* Lilis Ummi Fa'iezah MA, Guru MTsN 6 Sleman, alumni Curtin University Western Australia*

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Ritual Menghabiskan Anggaran Negara

**PEMANDANGAN** khas setiap akhir tahun, terutama November - Desember. Hotel-hotel berbintang diwarnai suasana riuh orang-orang pemerintahan yang melakukan rapat kerja, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sebagainya. Orang dari suatu kabupaten/kota akan melaksanakan kegiatannya di wilayah kabupaten/kota yang lain. Contoh, intansi di DKI Jakarta menggelar acara di wilayah Bogor, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Instansi DIY menggelar kegiatan di Magelang, Solo, dan sebagainya. Sebaliknya instansi di luar DIY mengadakan acaranya di Yogyakarta.

Silang lokasi dilakukan sebagai upaya untuk meniadasi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Tentang Standar Biaya Masukan yang setiap periode diperbaharui. Sesuai PMK, kalau kegiatan dilakukan dalam kota yang sama, peserta hanya boleh mendapatkan uang transport yang besarnya berkisar 150-an ribu. Namun, kalau kegiatan diselenggarakan di luar kota, pesertanya dapat menerima uang perjalanan dinas yang besarnya berbeda-beda untuk setiap kota.

Jika kegiatan intansi luar DIY digelar di Yogyakarta, pesertanya dapat menerima uang harian sebesar Rp 420.000 per hari apabila kebutuhan makannya tidak ditanggung panitia. Kalau makan selama berlangsungnya acara ditanggung panitia (*fullboard*), maka uang harian yang diterima biasanya untuk dua hari saja, yaitu waktu kedatangan dan kepulangan. Sedangkan selama waktu efektif berlangsungnya kegiatan hanya diberi uang harian sebesar Rp 140.000 per hari untuk DIY.

#### Ketidakmatangan Perencanaan

Penyiasatan PMK hanyalah satu sisi dari fenomena dalam pembelanjaan uang negara APBN/APBD). Yang lebih mengusik perhatian adalah ritual yang terus

#### Darmanto

berulang di setiap akhir tahun untuk menghabiskan anggaran. Pola penyelenggaraan kegiatan yang menumpuk di akhir tahun dan memilih lokasi di hotel-hotel mencerminkan adanya ketidakmatangan dalam perencanaan. Sekaligus menggambarkan tidak adanya efektivitas dan efisiensi.

Patut dipertanyakan, sesungguhnya kegiatan itu untuk apa dan siapa? Benarkah urgen bagi masyarakat luas? Kalau urgen, mengapa penyelenggaraannya di hotel? Benarkah untuk kepentingan publik? Jika jawabannya demikian, kapan realisasinya di masyarakat mengingat tahun berikutnya pasti sudah ada program baru.

Publik dapat menerima sebagai kewajaran kalau keriuhan di hotel-hotel pada akhir tahun bertujuan untuk melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja tahun berjalan. Bisa juga diterima kalau keluaran dari kegiatan tersebut adalah *breakdown* (pemerincian) program kerja untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga di awal tahun masyarakat sudah mengetahui jenis kegiatan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi.

#### Patut Diduga

Kalau berbagai ragam kegiatan di hotel pada akhir tahun untuk melaksanakan program di luar tiga hal tersebut (evaluasi, penyusunan laporan dan pemerincian kegiatan tahun berikutnya), patut diduga itu dimaksudkan hanya untuk penyerapan agar tidak ada sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara.

Memang dari segi administrasi keuangan, anggaran yang sudah ditetapkan harus terserap untuk memaknai anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi, mestinya jangan hanya asal terserap.

Fenomena terjadinya ritual penghabisan anggaran di akhir tahun menandakan adanya ketidakberesan dalam politik anggaran di negara ini baik di tingkat pusat maupun daerah. Logikannya, kalau beres dalam pengelolaan, tentu kegiatan akan terdistribusi secara merata di setiap bulannya dan tidak perlu ada penumpukan di akhir tahun. Kondisi demikian harus diperbaiki agar uang rakyat dapat dikelola secara akuntabel dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengubah tradisi yang buruk tersebut membutuhkan *political will* dan kepemimpinan yang visioner. Serta berpihak pada kepentingan masyarakat. □f

*\* Darmanto, Peneliti Senior BRIN, mahasiswa S3 Administrasi Publik Undip Semarang*

## Pojok KR

Mensos mendadak beli nasi bungkus dalam perjalanan ke Cianjur  
-- **Apakah kunjungan tanpa rencana dan tanpa persiapan?**  
\*\*\*

Angka kasus kanker masih tinggi  
-- **Periksa tak usah tunggu stadium lanjut**  
\*\*\*

Terkait BBM berkeadilan, Indonesia masih punya 'PR'  
-- **'PR' Indonesia banyak sekali**

*Berabe*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Bencana dan Kesetiakawanan Sosial

**BENCANA** Gempa Cianjur menyisakan duka. Ratusan korban yang meninggal, yang hilang dan luka-luka telah diberitakan di media. Dan kini, dalam beberapa group WA yang saya ikuti, muncul gerakan kesetiakawanan sosial yang luar biasa. Group tersebut mengajak berbagi dengan mengumpulkan donasi. Bisa langsung, bisa transfer. Kesetiakawanan sosial yang luar biasa. Bahkan kemudian dipikirkan akan

memberi bantuan apa, akan diwujudkan barang atau diserahkan uang.

Ini adalah pelaksanaan dan pengamalan sila-sila yang langsung muncul dalam masyarakat Indonesia. Memang Pancasila bukan hal yang hanya dihafalkan, namun langsung diwujudkan. Bangsa menjadi Bangsa Indonesia dengan Pancasila yang diamalkan dengan benar. □f

*Anggi, Seturan Yogyakarta*

### Masih Perlu Menjaga Prokes

**KETIKA** awal pandemi, peningkatan penjagaan protokol kesehatan (prokes) cukup digalakkan. Maka betapapun sederhana semua instansi menyediakan minimal tempat mencuci tangan dan sabun. Ada yang sangat sederhana dengan hanya menyediakan ember yang memiliki kran, ada yang menyediakan wastafel hingga penjaga kantor/satpan pengukur suhu. Namun ada yang lengkap dan cukup bagus: wastafel dengan sabun dan tisu, juga pengukur suhu digital.

Kini dikatakan, covid melandai. Namun di sisi lain diungkap peningkatan baru kasus juga terjadi dengan penularan dari varian baru, XBB.

Dimana-mana kasus meningkat. Namun anehnya, prokes mengendor. Bahkan tempat cuci tangan pun tidak lagi seperti dulu. Bahkan ada instansi pemerintah yang sudah emenghilangkan tempat mencuci tangan, meski alat pengering masih terlampel di dinding. Dan kantor/institusi swasta, lebih banyak yang sudah tidak beres tempat cuci tangannya. Ada yang dibiarkan kotor berlumut, menjadi tempat sampah yang berguguran dan lainnya.

Mengapa hal ini bisa didiamkan? Ternyata, bangsa ini memang mudah lupa. □f

*Warga Sleman, 081226xxxx*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).